

Peran LSM Dalam Mendorong Terwujudnya Transparansi Sektor Migas dan Tambang

Yenny Sucipto
SekJen FITRA
(Perwakilan LSM)

Potensi Penerimaan Negara

- ❑ **Penerimaan negara dihitung sangat rendah**, baik yang bersumber dari pajak maupun PNB (penerimaan negara bukan pajak), sehingga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara, seperti yang terus berulang selama ini
- ❑ Rendahnya tax ratio Indonesia
- ❑ Belum optimalnya tax ratio Indonesia menunjukkan adanya permasalahan mendasar pada sistem perpajakan Indonesia
- ❑ Penyalahgunaan atau korupsi perpajakan masih tinggi

Lanjutan

- ❑ PNBP (khususnya sektor SDA) cenderung mengalami penurunan dan berpotensi terjadi korupsi
 - ❑ Tidak optimalnya tata kelola SDA
 - ❑ Ketidak adilan kontrak-kontrak kerjasama
- ❑ Belum adanya pembenahan untuk memperbaiki pembayaran royalti
- ❑ Pengaturan konsepsi pertambangan dan investasi sumber mineral yang masih tumpang tindih
 - ❑ masih terdapat 30 KKKS yang tidak konsisten dalam menggunakan tarif pajak PPh
- ❑ Tahun 2009-2010 terdapat selisih kewajiban pph migas sebesar 92 milyar yang tidak ditindak lanjuti
- ❑ Tidak adanya pengawasan yang memadai terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan KKKS, sehingga negara dirugikan Rp 655 milyar karena pemerintah belum mengenakan sanksi atas keterlambatan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

- ❖ Selama 2006-2012, sektor migas mendominasi penerimaan (PNBP), dengan memberikan kontribusi rata-rat sebesar 60,5%
- ❖ Sektor berikutnya dikontribusi oleh perkebunan, kehutanan, dan pertambangan umum
- ❖ Penyebab tidak optimalnya tata kelola SDA,

Kelemahan Sistem Keuangan Negara

- ❖ Kelemahan meliputi:
 - ❖ Desain dan pelaksanaan sistem pengendalian internal
 - ❖ Proesur verifikasi dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan maupun non pajak
 - ❖ pengelolaan rekening pemerintah pada BI dan bank umum
 - ❖ pengelolaan rekening dana investasi dan rekening pembangunan daerah
 - ❖ pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara
 - ❖ pertanggungjawaban aset-aset yang diperoleh dari sisa aset program restrukturisasi BPPN yang tidak selesai
 - ❖ ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan
 - ❖ Pengelolaan PNB
 - ❖ Pengelolaan barang milik/kekayaan negara
 - ❖ pencatatan dan pelaporan belanja subsidi dan transfer serta belanja lain2
 - ❖ pengeluaran anggaran reboisasi penerimaan dan belanja dalm perjanjian pengelolaan aset

Kritik Atas Lemahnya Pengelolaan Keuangan Negara

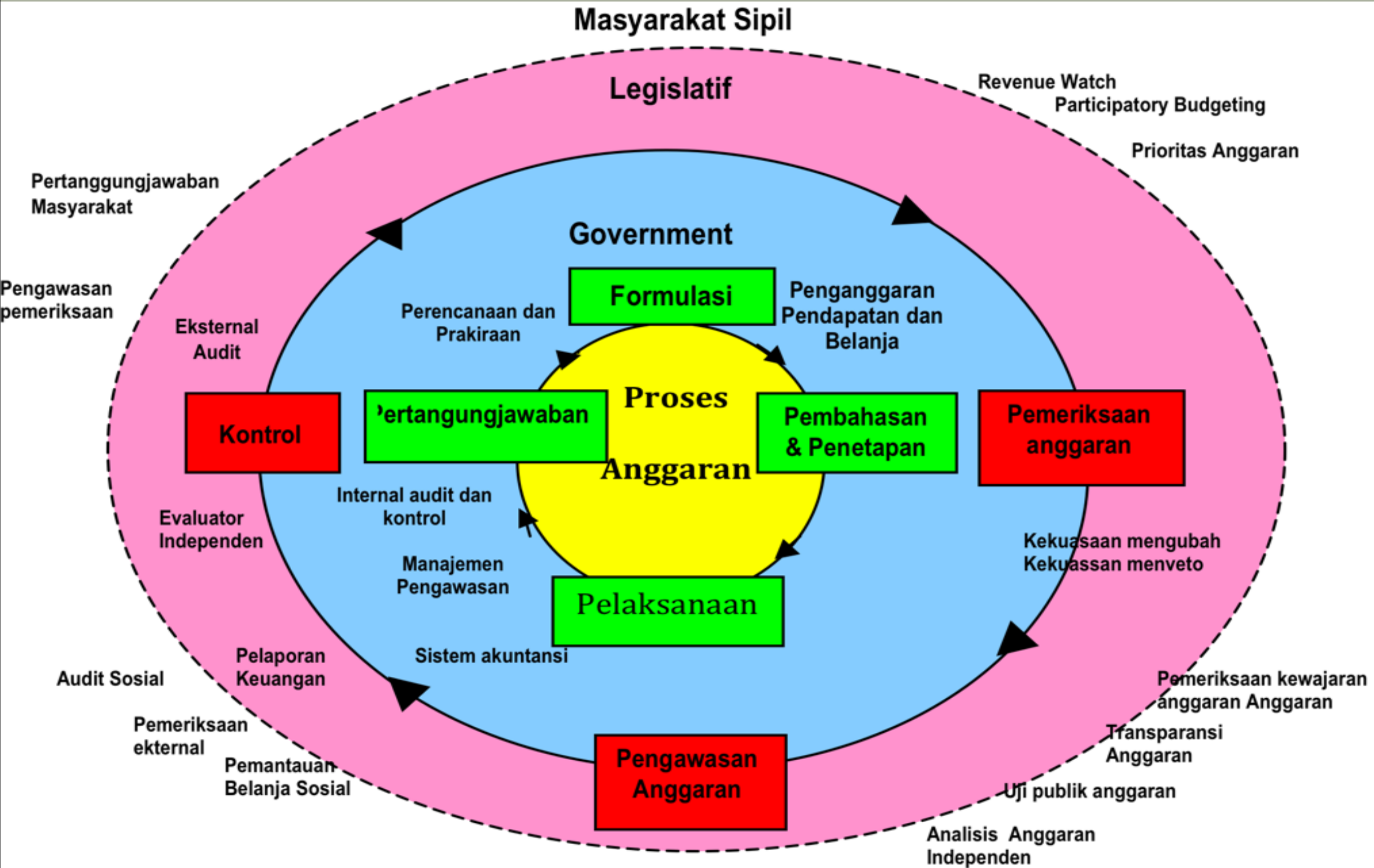
Pemerintah Daerah

- ✎ Badan Pengawas di daerah (Intern Pemda) tidak optimal
- ✎ DPRD tidak sepenuhnya melakukan fungsi pengawasan, justru menjadi bagian dari permasalahan
- ✎ Kurangnya tenaga yang menguasai teknis tata kelola negara di daerah
- ✎ Akuntabilitas publik yang kurang diperhatikan penyelenggaraan pemerintahan

Pemerintah Pusat

- Birokrasi Anggaran Ketat Diatas Kertas, Namun Tidak Ada Pembinaan Intensif
- Lambatnya proses penganggaran keuangan negara
- Lambatnya pencairan anggaran dari pusat
- Ketidak konsistenan pusat melaksanakan UU
- Kurangnya reformasi tata kelola keuangan pada departemen dan instansi vertikal

Peran Aktor dalam Siklus Penganggaran



ARENA DAN AKTOR

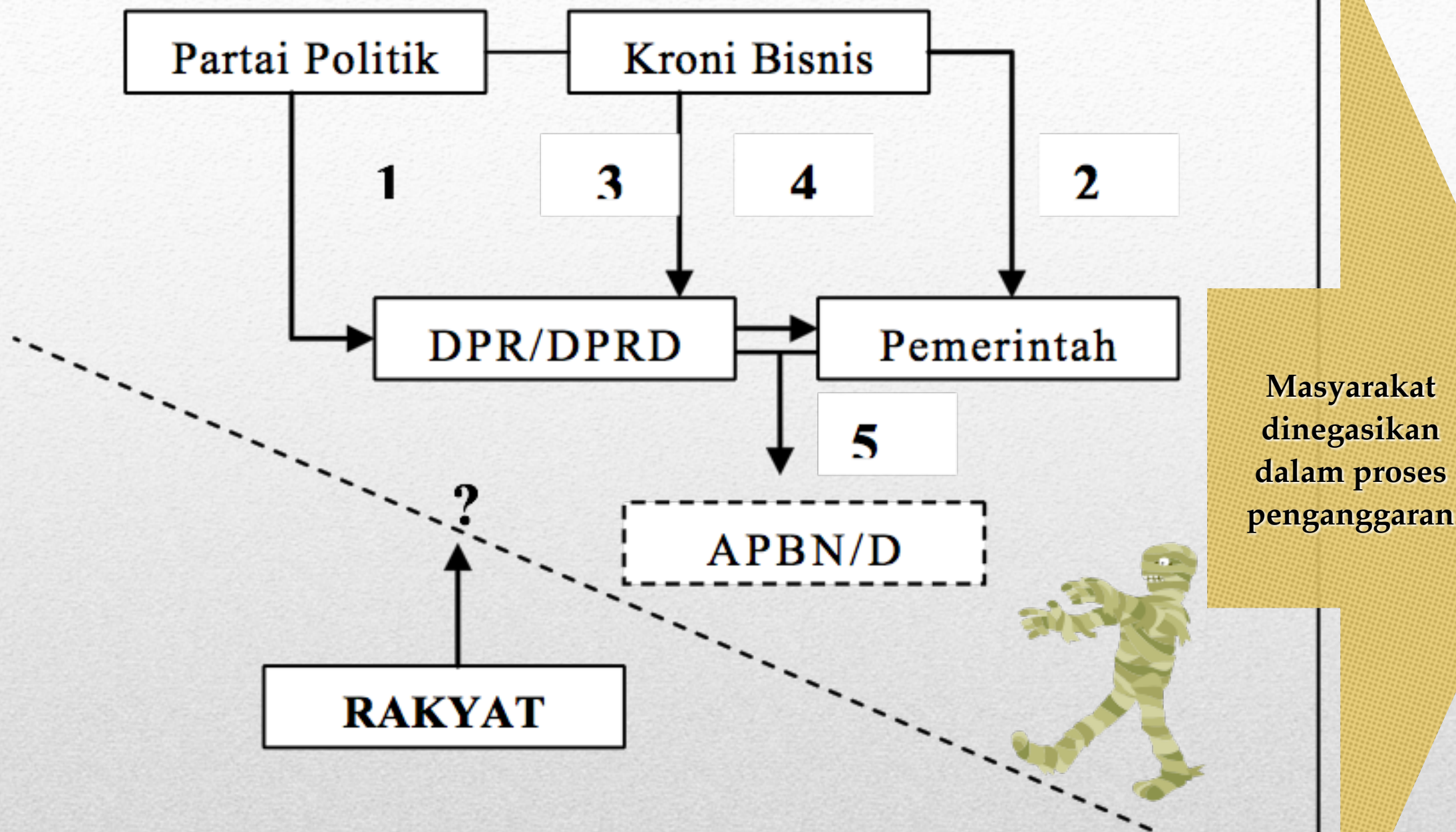
Eksekutif

PERENCANAAN
PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN DAN
ARENA KEBIJAKAN
STRATEGIS

Legislatif

MASYARAKAT





Skema Politik Anggaran

Pemerintah dan
Parlemen

Tujuan
Perubahan
Kebijakan

Advokasi :mewujudkan transparansi

LSM, Media massa,
jaringan, dll

Masyarakat Sipil;
subjek utama sekaligus
sasaran

